

BAB I

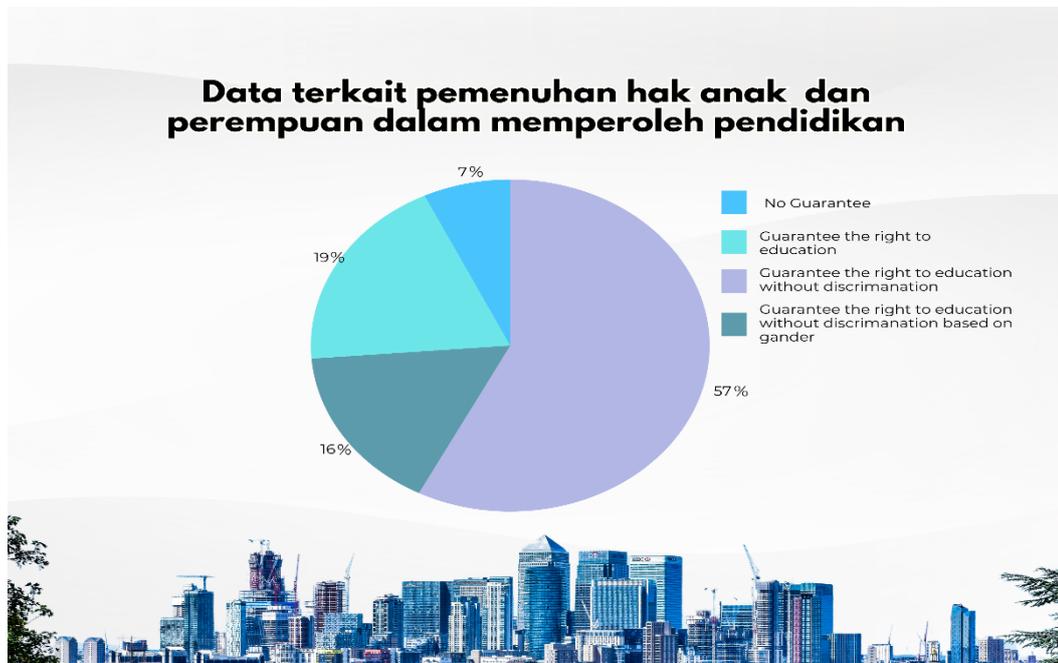
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan inklusif merupakan bagian penting dari sistem pendidikan yang menempatkan pemenuhan hak penyandang disabilitas karena dapat memberikan upaya kesempatan belajar yang adil kepada semua anak, baik secara reguler maupun anak berkebutuhan khusus, dapat memperoleh pendidikan secara adil serta merata (Wardah, 2019). Pendidikan inklusif adalah sebuah kebijakan yang diimplementasikan oleh Pemerintahan Indonesia. Berdasarkan Peraturan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak penyandang disabilitas yang berbunyi tentang setiap individu yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik yang mengalami hambatan untuk berpartisipasi penuh di masyarakat berhak mendapatkan akses yang setara, termasuk dalam dunia pendidikan (Putri & Nugraha, 2024).

Namun demikian, meskipun kebijakan inklusi telah banyak diupayakan, tantangan dalam mewujudkan akses pendidikan yang setara masih terjadi di berbagai belahan dunia. Menurut data dari Laporan Pemantauan Pendidikan Global (UNESCO, 2023). Meskipun ada kemajuan, sekitar 260 juta anak belum memiliki akses ke pendidikan, terutama anak perempuan di daerah pedesaan dan wilayah konflik yang sering putus sekolah akibat norma sosial atau faktor ekonomi. Data UNESCO juga menunjukkan bahwa 57% negara menjamin hak pendidikan tanpa diskriminasi gender, 6% menjamin hak pendidikan tanpa diskriminasi secara umum, 20% hanya menjamin hak pendidikan tanpa rincian, dan 16% negara belum memiliki jaminan hak pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak negara telah menerapkan kebijakan pemenuhan hak atas akses pendidikan, masih ada kesenjangan yang perlu diatasi agar pendidikan inklusif benar-benar terwujud untuk semua kelompok, terutama bagi mereka yang rentan. Oleh karena itu, perbaikan kebijakan dan peningkatan kesadaran publik sangat diperlukan agar prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan dapat tercapai secara nyata, termasuk bagi penyandang disabilitas yang berhak memperoleh akses pendidikan yang setara dan tanpa diskriminasi. Berikut adalah grafik data yang dihasilkan oleh

UNESCO yang memperlihatkan pendidikan tanpa diskriminasi, yang sekaligus menggambarkan masih adanya kesenjangan akses pendidikan di berbagai belahan dunia. Grafik ini juga dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan lebih lanjut untuk mewujudkan pendidikan inklusif secara global.



Gambar 1. 1 Perlindungan Hukum Hak Atas Pendidikan

Sumber : (UNESCO,2023)

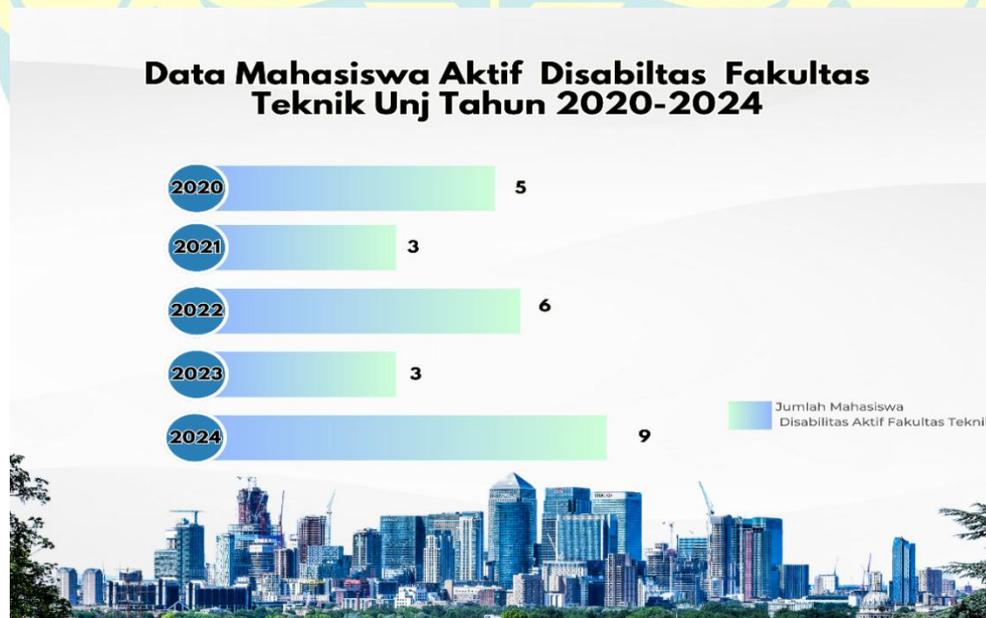
Situasi ini juga menjadi perhatian di Indonesia, yang berupaya mengatasi berbagai kesenjangan akses pendidikan melalui kebijakan yang lebih inklusif, termasuk di perguruan tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi, pada pasal 5 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa perguruan tinggi wajib menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas. Fasilitas tersebut benar harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek kemudahan, keamanan, dan kenyamanan guna mendukung proses belajar mengajar yang inklusif (Githa Putri Rengganis & Dini Gandini Purbaningrum, 2024). Sejalan dengan pernyataan diatas, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 membahas mengenai pemberian akomodasi yang sesuai untuk penyandang disabilitas ketentuan tersebut tercantum terdapat pada bab II tentang Penyediaan akomodasi yang layak

pada Pasal 5 ayat (2) yaitu memberikan panduan terkait fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk implementasi pendidikan inklusif (Githa Putri Rengganis & Dini Gandini Purbaningrum, 2024).

Pendidikan inklusif sebuah pendekatan yang tidak hanya menekankan pada akses fisik bagi peserta didik, tetapi juga mencakup sebuah penyediaan fasilitas pendidikan yang sangat memadai, sehingga dapat membangun sebuah lingkungan pendidikan yang dapat diakses oleh semua individu tanpa memandang perbedaan latar belakang maupun kondisi pribadi. Pernyataan ini sejalan dengan tujuan pendidikan inklusif, yang bertujuan untuk menjamin setiap anak dapat mendapatkan peluang pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, sehingga dapat memperoleh atau membuka peluang untuk layanan pendidikan yang berkualitas dan selaras dengan potensi serta kebutuhan individu (Farah et al., 2022). Sebagai bagian dari upaya global, tujuan keempat dalam *Sustainable Development Goals* (SDGS) bertujuan menjamin pendidikan yang berkualitas, inklusif, serta setara bagi semua, serta akses belajar sepanjang hayat. Pencapaiannya memerlukan pendekatan menyeluruh melalui peningkatan pengajaran, pemerataan sumber daya, dan lingkungan pendidikan yang inklusif (Unterhalter, 2019). Seiring dengan pelaksanaan pendekatan diatas Ketersediaan dan kualitas fasilitas yang memadai berperan penting dalam mendukung pendidikan inklusif.

Dalam konteks pendidikan fasilitas sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting didunia pendidikan yang keberadaanya sangat mutlak yang harus disediakan (Supratikta et al., 2023). oleh sebab itu, agar seluruh fasilitas dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendorong pendidikan, diperlukan manajemen yang efektif, Pengelolaan sarana dan prasarana yang terorganisir dengan baik diyakini mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi seluruh tenaga pendidik yang wajib diterapkan disemua institusi pendidikan, khusus nya pada perguruan tinggi guna menciptakan perguruan tinggi yang sangat efektif (Kartini et al., 2023). Khususnya di perguruan tinggi yang masih membutuhkan fasilitas khusus seperti Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta.

Menurut data terbaru yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statiska (BPS) tahun 2020, terdapat sebanyak 1.544.184 anak penyandang disabilitas di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 330.764 anak (21,42%) berada pada rentang diusia 5-18 tahun. Namun, hanya 85.737 di antaranya yang memperoleh akses pendidikan yang setara. Sementara itu penyandang disabilitas di Indonesia secara keseluruhan 22,5 Juta jiwa sekitar 5 % dari total populasi (Kementerian Sosial RI, 2020). Di sisi lain, beberapa perguruan tinggi, termasuk Universitas Negeri Jakarta, telah mengambil langkah positif dalam membuka kesempatan bagi mahasiswa disabilitas. Khususnya di Fakultas Teknik, peluang ini mulai terbuka sejak 2020 hingga 2024. Saat ini, terdapat sekitar 26 mahasiswa disabilitas yang tersebar di berbagai program studi. Rinciannya, pada tahun 2020 terdapat 5 mahasiswa disabilitas, kemudian pada tahun 2021 jumlahnya menurun menjadi 3 mahasiswa. Di tahun 2022, jumlahnya kembali meningkat menjadi 6 mahasiswa, namun mengalami penurunan di tahun 2023 dengan hanya 3 mahasiswa. Menariknya, pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, dengan bertambahnya 9 mahasiswa disabilitas. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang lebih serius dalam mendukung inklusifitas dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi mahasiswa disabilitas (Febriani, 2024). Berikut adalah grafik yang menggambarkan data tersebut



Gambar 1. 2 Mahasiswa Disabilitas Fakultas Teknik Unj Tahun 2020 - 2024

Sumber : (LP3M, UNJ)

Saat ini Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta memiliki 26 mahasiswa penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai program studi. dengan jumlah terbanyak adalah S1 Pendidikan Tata Boga sebanyak 5 mahasiswa, D4 Seni Kuliner dan Pengelolaan Jasa Makanan, S1 Pendidikan Tata Busana, S1 Sistem dan Teknologi Informasi sebanyak 4 mahasiswa serta S1 Pendidikan kesejahteraan keluarga sebanyak 2 mahasiswa, lalu D4 Tata Busana, D4 Design Mode, D4 Teknologi Rekayasa Otomasi, S1 Pendidikan Teknik Bangunan, S1 Pendidikan Elektronika, S1 Pendidikan Tata Rias, S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Sebanyak masing – masing 1 Mahasiswa, Jenis disabilitas yang tercatat meliputi tunarungu 19 mahasiswa, tunadaksa sebanyak 2 mahasiswa, tunagrihita sebanyak 1 mahasiswa, ADHD sebanyak 2 mahasiswa, tunagrahita 1, dan lamban belajar 1. Keberagaman ini mencerminkan komitmen Fakultas Teknik UNJ dalam menyediakan sebuah akses pendidikan yang inklusif terhadap seluruh mahasiswa. Melalui langkah-langkah yang tepat, Fakultas Teknik UNJ dapat menjadi contoh dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang benar-benar ramah disabilitas dan berkesinambungan bagi seluruh mahasiswa, termasuk individu yang memiliki penyandang disabilitas.

Namun, keberhasilan inklusifitas dalam pendidikan tinggi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan fasilitas internal kampus, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti aksesibilitas transportasi. Berdasarkan penelitian dilakukan Pramana & Efendi, (2019) mengungkapkan bahwa permasalahan aksesibilitas transportasi publik juga berperan penting dalam mendukung aksesibilitas pendidikan tinggi. Di kota-kota besar, seperti Yogyakarta, aksesibilitas yang buruk dapat menghambat mahasiswa dalam mencapai kampus, sehingga perlu adanya kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur. Disisi lain Radakovic, (2019) juga mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa kemudahan untuk mengakses fasilitas pendidikan masih menghadapi berbagai hambatan terutama pada fasilitas sarana dan prasarana untuk aksesibilitas yang belum sepenuhnya terwujud pada dunia pendidikan. Maka dari itu, akses fasilitas pendidikan perlu mengembangkan dan menerapkan standar yang jelas dalam merancang sarana dan prasarana, sehingga dapat memenuhi kebutuhan semua pendidik.

Dewi Pangestuti, (2022) Menunjukkan bahwa pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam hal fasilitas pendidikan yang mendukung aksesibilitas. Permasalahan ini merupakan isu yang kompleks dan multifaset, dimana tidak semua fasilitas pendidikan di Indonesia mampu menawarkan akses yang setara untuk semua individu, terutama penyandang disabilitas. Di sisi lain Kriswanto, (2023) juga berpendapat masalah utama yang berdampak pada aksesibilitas pendidikan adalah tersedianya prasarana dan sarana. Namun, faktanya, beberapa institusi pendidikan di Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas yang inklusif, yang menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan fasilitas yang inklusif. Akibatnya, pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif harus menjadi fokus utama mewujudkan suasana pendidikan yang inklusif dan setara bagi semua kalangan.

Menurut Maula, (2023) untuk mengatasi permasalahan diatas diperlukan upaya yang sistematis dan terkoordinasi dalam meningkatkan fasilitas pendidikan, terutama di daerah yang tertinggal, otoritas pemerintah bersama pemangku kepentingan perlu menjalin kolaborasi secara teratur dalam beberapa masalah di atas. Ini termasuk mendapatkan fasilitas yang memadai, memberikan pelatihan kepada pendidik, dan meningkatkan akses terhadap teknologi pendidikan. Perguruan tinggi harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur mereka saat ini untuk meningkatkan aksesibilitas.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Monic, (2019) aksesibilitas bagi penyandang disabilitas digedung Universitas Tantri Abeng dengan tujuan penelitian untuk memastikan apakah fasilitas yang tersedia telah memenuhi pedoman teknis yang ditetapkan oleh pemerintah, namun kesesuaian fasilitas yang telah tersedia masih ada kekurangan, paling banyak dapat ditemui di fasilitas toilet yang tidak memadai dan tidak sesuai dengan pedoman teknis. Kemudian pada penelitian yang dilakukan Putra & Widajanti, (2019) menyatakan bahwa aksesibilitas kesadaran akan pentingnya fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas masih rendah, sehingga fasilitas belum memberikan aksesibilitas yang layak sesuai standar yang berlaku. Hasil dari penelitian Mularsih, (2019) menyatakan bahwa masih belum memenuhi standar yang diterapkan untuk pendidikan inklusif, terutama dengan

kebutuhan sarana, pendidikan dan kurikulum yang mendukung siswa berkebutuhan khusus. Kemudian penelitian selanjutnya yang dilakukan Sania, (2019) Agar pendidikan inklusif dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan pendidikan yang adil bagi semua anak, diperlukan dukungan lebih lanjut dari kebijakan, tenaga pendidik, dan fasilitas.

Pada penelitian di atas, fokus utamanya adalah menilai kesesuaian fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yang banyak menyoroti rendahnya kesadaran akan pentingnya fasilitas yang memadai sehingga belum sesuai dengan standar aksesibilitas. Berbeda dengan penelitian ini, berfokus pada penilaian standar aksesibilitas sarana dan prasarana yang dirancang untuk memberikan rekomendasi guna mendukung pendidikan inklusif. Fokus tersebut tidak hanya mengacu pada pedoman teknis pemerintah seperti Permen PUPR No. 14 Tahun 2017, HWDI dan *Unicef* tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan nyata mahasiswa berkebutuhan khusus di lingkungan pendidikan tinggi.

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini dilakukan untuk menilai standar aksesibilitas sarana dan prasarana guna mendorong pendidikan inklusif di Fakultas teknik. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi seberapa baik kondisi fasilitas yang tersedia, memastikan kesesuaiannya dengan kriteria standar pendidikan inklusif yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, dengan menggunakan gabungan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memahami pengalaman, persepsi, dan perspektif para pemangku kepentingan dalam implementasi aksesibilitas di perguruan tinggi.

1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk pada penjelasan latar belakang, terdapat beberapa masalah yang dapat identifikasi sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran dan pemenuhan terhadap standar aksesibilitas sarana dan prasarana yang seharusnya dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan perguruan tinggi.
2. Ketidakesuaian terhadap standar aksesibilitas sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah dalam penyediaan fasilitas khususnya di perguruan tinggi.

3. Kurangnya standar aksesibilitas sarana dan prasarana yang belum terpenuhi bagi penyandang disabilitas khususnya di perguruan tinggi.
4. Kurangnya keterbatasan serta keterlibatan mahasiswa penyandang disabilitas dalam perencanaan yang mengakibatkan kebutuhan mereka tidak terakomodasi dengan optimal.
5. Tidak adanya sistem evaluasi dan perbaikan fasilitas secara berkelanjutan untuk memastikan aksesibilitas yang mengacu pada ketentuan dan pedoman yang telah ditepkan oleh pemerintah.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah agar cakupan pembahasan tidak terlalu luas, dengan berfokus pada Standar Aksesibilitas Sarana dan Prasarana untuk mendorong pendidikan inklusif di Fakultas Teknik UNJ. Fokus penelitian juga hanya mencakup elemen-elemen seperti ruang kelas, ruang bengkel, toilet, *lift*, ram, titik kumpul, musholla, sarana evakuasi dan tangga.

1.4 Perumusan Masalah

Berlandaskan pada identifikasi serta batasan masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sarana dan prasarana di Gedung Fakultas Teknik UNJ, seperti ruang kelas, ruang bengkel, toilet, *lift*, ramp, titik kumpul, mushola, sarana evakuasi, dan tangga, sudah memenuhi standar aksesibilitas untuk mendukung pendidikan inklusif?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di Gedung Fakultas Teknik UNJ, seperti ruang kelas, ruang bengkel, toilet, *lift*, ramp, titik kumpul, mushola, sarana evakuasi, dan tangga agar lebih ramah terhadap mahasiswa penyandang disabilitas?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini memiliki yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah fasilitas seperti ruang kelas, bengkel, toilet, *lift*, ram, titik kumpul, musholla, sarana evakuasi dan tangga di Gedung Fakultas Teknik UNJ telah memenuhi standar aksesibilitas.
2. Mengevaluasi fasilitas seperti ruang kelas, bengkel, toilet, *lift*, ram, musholla, sarana evakuasi dan tangga di Gedung Fakultas Teknik UNJ yang belum memenuhi standar aksesibilitas.

1.6 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat baik dari perspektif teoritis maupun perspektif praktis yaitu sebagai berikut :

A. Manfaat teoritis

Penelitian ini mampu dapat memperkaya literatur dan kajian mengenai standar aksesibilitas di pendidikan tinggi, dan menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang berfokus pada aksesibilitas pendidikan di bidang teknik serta penerapan prinsip dalam lingkungan pendidikan tinggi.

B. Manfaat praktis

a) Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini dapat memberikan bantuan untuk lembaga pendidikan, terutama pada gedung fakultas teknik unj, dalam menyusun standar aksesibilitas sarana dan prasarana yang sesuai untuk mahasiswa disabilitas, sehingga membentuk lingkungan belajar yang inklusif.

b) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan keuntungan bagi mahasiswa penyandang disabilitas dengan penyediaan panduan yang jelas terkait fasilitas yang mendukung kebutuhan mereka.